

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN
BARU DI SD MUHAMMADIYAH
30 MEDAN**

SKIPSI

**OLEH :
CHAIRUNNISA
NPM : 1603100020**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jurusan Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : Chairunnisa
NPM : 1603100020
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Di SD Muhammadiyah 30 Medan

Medan, 14 April 2022

PEMBIMBING

SYAFRUDDIN, S.Sos, MH.

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP

DEKAN



DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama : Chairunnisa
NPM : 1603100020
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : Pukul 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si**

PENGUJI II : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A**

PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

()
()
()

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Si


ABRAR ADHANI, S.Sos., M.L.Kom



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya CHAIRUNNISA, NPM 1603100020, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2022

Yang menyatakan


CHAIRUNNISA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta lindungan-Nya, Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun akhirat.

Sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis membuat Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI SD MUHAMMADIYAH 30 MEDAN”**

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan gagasan, bimbingan dan berbagai dukungan lainnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terutama dan paling utama ALLAH SWT.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, alm. Ayahanda Saibnur dan kepada Ibunda tercinta Juliana yang telah mendidik dan membimbing dari kecil, serta seluruh keluarga besar yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari merka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardiaka S.Sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan banyak ilmu, dukungan, serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
10. Bapak Abdul Ripai, S.Pd selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan yang telah membantu dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya stambuk 2016 Ilmu Administrasi Publik.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak

yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa maupun masyarakat luas. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan,

Chairunnisa

1603100020

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN
2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN
BARU DI SD MUHAMMADIYAH 30 MEDAN**

CHAIRUNNISA

1603100020

ABSTRAK

Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di SD Muhammadiyah 30 Medan telah terimplementasi. Hal Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan dan Orang Tua Murid SD Muhammadiyah 30 Medan. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan Adaptasi kebiasaan baru di SD Muhammadiyah 30 telah terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan himbauan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah khususnya di SD Muhammadiyah 30 Medan. Bentuk partisipasi yang dilakukan Kepala Sekolah sebagai pelaksana implementor adalah melaksanakan, menghimbau serta menyediakan fasilitas-fasilitas kebutuhan penerapan protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan sekolah, dan ini di berlakukan

untuk seluruh murid-murid dan staff pengajar. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan dan disediakan oleh pelaksana (implementor) dengan mencapai suatu logika dalam kebijakan dalam penerapan sebuah peraturan di lingkungan tempat kebijakan di operasikan. Kepala sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan ikut berkesinambungan akan kebijakan ini tetap berlangsung dengan melakukan pengevaluasian kembali.

Kata Kunci: Implementasi, Partisipasi dan Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid 19.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Kebijakan Publik	8
2.1.1 Pengertian Implementasi	8
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.1.3 Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.1.4 Tahapan-Tahapan Implementasi Kebijakan Publik	16
2.1.5 Pengertian Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid 19	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	22
----------------------------	----

3.2	Kerangka Konsep	23
3.3	Definisi Konsep	24
3.4	Kategorisasi Penelitian	25
3.5	Narasumber Penelitian	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7	Teknik Analisis Data	28
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.9	Deskripsi Lokasi Penelitian	30
	1. Sejarah Singkat SD Muhammadiyah 30 Medan	30
	2. Visi Dan Misi SD Muhammadiyah 30 Medan	30
	3. Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Sekolah	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	45
4.2	Pembahasan	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	59
5.2	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian	25
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3 Struktur Organisasi SD Muhammadiyah 30 Medan	44
Gambar 3.2 model interaktif Miles dan Huberman	28
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sedang dalam masa pandemi covid 19. Pada masa pandemi covid 19 ini, banyak sekali peraturan dan adaptasi baru yang diatur oleh Pemerintah dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat. Berbagai jenis kalangan masyarakat mulai dari individu, kelompok masyarakat, organisasi, kalangan pekerja swasta dan negeri, peserta didik dan lain sebagainya harus mengalami perubahan pola aktivitas normal menjadi sedikit berbeda di masa pandemi covid 19. Tujuan dari diberlakukannya adaptasi baru tersebut semata-mata demi menghindari seluruh kalangan masyarakat dari bahaya tertular virus covid 19.

Untuk Kota Medan, Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020. Peraturan ini menjelaskan tentang upaya penanggulangan atau penanganan guna memutus mata rantai penularan virus covid 19, maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi.

Tujuan pemerintah membentuk Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 adalah sebagai bentuk percepatan penanganan covid 19 di daerah-daerah, meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi baru pada kondisi pandemi covid 19 secara integrasi dan efektif, meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan tentang

adaptasi kebiasaan baru selama pandemi covid 19 antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah.

Pada pasal 6 Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 menjelaskan bahwa setiap kalangan masyarakat harus menerapkan beberapa protokol kesehatan, antara lain:

1. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau memakai pembersih tangan (*sanitizer*)
2. Menggunakan masker atau apabila diperlukan harus menggunakan *face shield* dan menjaga jarak dalam rentang paling sedikit 1 meter dengan individu lain ketika berada di luar rumah
3. Menghindari kerumunan pada saat diluar rumah
4. Melakukan karantina (isolasi mandiri) baik dirumah atau diruang karantina sesuai protokol kesehatan bagi seluruh kalangan masyarakat

Bagi dunia pendidikan, adaptasi kebiasaan baru sangat berpengaruh terhadap pola dan metode belajar mengajar. Hal ini disebabkan semenjak pandemi covid 19 melanda Indonesia, dunia pendidikan mendapat banyak perubahan. Adaptasi kebiasaan baru itu sendiri merupakan cara merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Keadaan dimana ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga masyarakat tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona. Adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan pada sektor atau bidang penting seperti rumah ibadah, pasar atau pertokoan, perkantoran, transportasi umum, hotel, dan

restoran, serta dilakukan saat wilayah sudah menjadi zona aman (zona hijau) yang dihitung berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Saat ini dunia pendidikan menjalani masa belajar dirumah untuk daerah-daerah yang sedang memasuki zona merah atau hitam pandemi covid 19. Hal ini dibenarkan pada pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pencegahan dan pengendalian covid 19 dilakukan terhadap kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat, penanggung jawab kegiatan, pengelola dan pelaku usaha yang dijelaskan pada pasal 7 yang meliputi: sekolah, institusi pendidikan, usaha atau segala jenis kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan atau aktivitas lainnya dan pesantren.

Bagi aktivitas dunia pendidikan seperti sekolah, pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota nomor 27 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran diutamakan melalui pembelajaran dirumah atau ditempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh (*daring*) dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Pada ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 menjelaskan bahwa jika memungkinkan untuk proses belajar tatap muka, maka: membentuk satuan tugas mandiri tanggap covid 19 yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada gugus tugas daerah, menggunakan masker dan apabila dibutuhkan menggunakan *face shield*, melarang masuk setiap orang yang tidak menggunakan masker di area atau lingkungan sekolah, melakukan pembersihan, sterilisasi, atau penyemprotan desinfektan setiap hari secara berkala, menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh di pintu masuk, menyediakan fasilitas

mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa, serta menjaga keamanan dan ketertiban sekolah.

Fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan di masa pandemi covid 19 masih menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan masyarakat khususnya orang tua siswa ada yang menyetujui pembelajaran daring dirumah dan ada yang tidak. Pihak-pihak sekolah pun masih ada yang tetap melakukan pembelajaran tatap muka kepada para siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan meninjau ke beberapa sekolah yang ada di Kota Medan menemukan bahwa, ada beberapa sekolah yang tetap mengadakan proses belajar tatap muka, namun memberikan batasan siswa yang hadir.

Dari hasil wawancara singkat yang dilakukan dengan para guru yang ditemui di beberapa sekolah menjelaskan bahwa, banyak orang tua yang tidak menerima jika sekolah hanya melakukan belajar daring. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti proses belajar mengajar yang kurang efektif, siswa yang tidak mau belajar ketika dirumah, keterbatasan penggunaan internet dan lain sebagainya.

SD Muhammadiyah 30 Medan adalah salah satu sekolah swasta yang tidak meliburkan sepenuhnya siswa dan guru. Alasannya agar kinerja guru tetap maksimal dan efektif serta siswa tetap mendapatkan proses belajar tatap muka. Dari hasil wawancara singkat dengan salah satu guru di SD Muhammadiyah 30 Medan menjelaskan bahwa terkadang siswa harus datang kesekolah untuk mengambil atau mengantar materi pembelajaran. Waktu dan hari akan disesuaikan

atau dibagi agar kedatangan siswa atau orang tua untuk mengambil dan mengantar materi pembelajaran tidak terlalu ramai. Tentu saja pihak sekolah harus tetap menyediakan fasilitas tambahan yang sesuai dengan protokol kesehatan agar dapat terhindar dari bahaya penularan virus covid 19.

Berdasarkan uraian dan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih spesifik tentang implementasi pelaksanaan adaptasi baru di SD Muhammadiyah 30 Medan. Peneliti ingin mengetahui apakah SD Muhammadiyah 30 Medan sudah menerapkan seluruh protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di SD Muhammadiyah 30 Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di SD Muhammadiyah 30 Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di SD Muhammadiyah 30 Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian antara lain:

1. Secara akedemis, hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada FISIP UMSU khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam rangka memperkaya literatur bacaan dan khasanah penelitian bagi Mahasiswa.
2. Secara teoritis, diharapkan untuk menerapkan teori kebijakan publik yang didapat penulis selama menjadi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU serta memperkaya wawasan penulis.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi masukan kepada berbagai pihak khususnya untuk sekolah-sekolah yang sedang menjalani adaptasi penyesuaian baru pandemi covid 19. Selain itu, bagi mahasiswa lain, dengan adanya penelitian ini dapat membantu menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan materi yang sama.

1.5Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan sistematika penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang Konsep Implementasi, Konsep Kebijakan Publik, Konsep Adaptasi Penyesuaian Baru, Covid 19.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, narasumber penelitian, kategorisasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang penjabaran analisis data riset penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Berisikan Penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi merupakan sebuah peraturan kebijakan dasar yang ditetapkan secara resmi dan tertulis oleh Pemerintah berupa sebuah undang-undang dasar, ataupun ketetapan lainnya. Menurut Winarno (2010:149), implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyadi (2015:12), bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan dalam kebijakan. Tindakan yang dilakukan tersebut untuk mengubah keputusan-keputusan yang menjadi pola operasional serta berusaha semaksimal mungkin dalam membuat perubahan besar atau kecil dalam sebuah kebijakan tersebut. Mulyadi juga menambahkan bahwa pelaksanaan implementasi terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Adanya pelaksanaan keputusan oleh instansi atau lembaga pelaksana
2. Kesiapan sebuah kelompok dalam melaksanakan sebuah keputusan kebijakan
3. Dampak nyata dari sebuah keputusan baik itu dikehendaki ataupun tidak
4. Upaya perbaikan atas kebijakan tersebut

5. Penyiapan sumber daya, unit dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan
6. Penterjemahan kebijakan yang menjadi arahan yang dapat dijalankan dan dilaksanakan
7. Penyediaan layanan, pembayaran dan rutinitas lainnya.

Sementara itu, menurut Kapioru (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumber daya (*resources*)
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Purwanto dalam Kapioru (2014:13), juga menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

- 1) Kualitas kebijakan itu sendiri.
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- 3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- 4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).

- 6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah pelaksanaan keputusan kebijakan dimana kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tertulis dan resmi dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dan digunakan dalam mengambil tindakan untuk kepentingan seluruh masyarakat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson (2010:21), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Dunn (2010:20) bahwa kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan pembangunan perkotaan. Kemudian, menurut Nugroho dalam Sore & Sobirin (2017:8), kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur sebuah kehidupan

dimana aturan tersebut harus diikuti dan ditaati dan berlaku untuk mengikat masyarakat sebagai warga negara.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Laswell & Kaplan dalam Sore & Sobirin (2017:8), bahwa kebijakan publik adalah sebuah sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai program yang diproyeksikan atau dijalankan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Thomar R. Dye dalam Sore & Sobirin (2017:8), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan ditetapkan oleh Pemerintah, mengapa hal tersebut dikerjakan dan ditetapkan serta apa hasil yang ingin dicapai.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan dan aturan yang diatur dan dikerjakan oleh Pemerintah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi mensejahterakan masyarakat sebagai warga negara.

2.1.3 Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik

Pada teori-teori penerapan implementasi kebijakan publik, ada beberapa pendapat dari para ahli, antara lain:

a. Kebijakan David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining (Subarsono, 2011:396), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- 1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis.
- 3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

b. Teori Implementasi Model Matland

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi model Matland. Teori Matland dipilih karena unsur-unsur yang terdapat dalam teori ini sesuai dengan penelitian penulis. Menurut Agostiono (2010:156), teori implementasi model Matland menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- 1) Ketepatan Kebijakan/ Ketepatan sebuah kebijakan dapat ini dinilai dari: Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan ; Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- 2) Ketepatan Pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan tidaklah hanya dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk memaksimalkan ketepatan pelaksanaan sebuah aktivitas atau

kegiatan, ada tiga unsur dapat bisa menjadi pelaksana selain Pemerintah, yakni kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

- 3) Ketepatan Target. Untuk mencapai ketepatan sebuah target dari pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan beberapa unsur, yakni :
- Perencanaan target yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang peraturan yang telah dibuat, tidak ada tumpang tindih dengan aktivitas lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain ; Target yang menjadi sasaran pelaksanaan dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Adanya bentuk kesiapan target yang menjadi sasaran bukan secara alami (kondisi lingkungan) saja, namun juga dilihat apakah kondisi target (personal) dalam keadaan baik atau tidak ; Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

- 4) Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Dan Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan

interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam sebuah implementasi.

c. Teori Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Agostiono (2010:154), ada enam variabel implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja kebijakan yakni sebagai berikut :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Adanya sebuah kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari keberhasilannya jika tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- 2) Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber dayayang tersedia.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana. Adanya fokus perhatian pada agen pelaksana (pelaksana kegiatan) mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang melibatkan pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan untuk menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan tersebut, maka akan semakin besar pula agen yang dilibatkan.
- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Adanya sikap penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh agen pelaksana

(pelaksana kegiatan) akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

- 5) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Ada tidaknya sebuah kondisi koordinasi komunikasi yang baik, dapat dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses implementasi mengutarakan asumsi kesalahannya begitu pula sebaliknya.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan

2.1.4 Tahapan-Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi

yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

Adapun pendapat para ahli tentang tahapan implementasi kebijakan yakni menurut Meter dan Horndal (Sujianto, 2008:35), bahwa menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

1) Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards objectives*).

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

2) Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

3) Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganizational Communication and enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten

dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi ke bawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

4) Karakteristik Pelaksana (*The Characteristics of the Implementing Agencies*).

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staff tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumber daya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan Pemerintah telah menjadi perhatian utama, hal ini dikarenakan Eksospol mempengaruhi implementasi berjalan dengan baik ataupun tidak, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol

terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- a) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
 - b) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
 - c) Bagaimana sifat umum ; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
 - d) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
 - e) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana ; adaoposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.b.
- 6) Disposisi atau Sikap Pelaksana Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan.

Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yakni kognisi (pemahaman dan pengetahuan), arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak serta intensitas dari respon pelaksana.

2.1.5 Pengertian Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid 19

Saat ini, pemerintah Republik Indonesia tidak lagi menggunakan istilah “*new normal*” yang kerap digunakan selama pandemi Covid-19. Istilah tersebut telah diganti menjadi “adaptasi kebiasaan baru” atau AKB. Pada era ini,

masyarakat bisa beraktivitas kembali secara produktif, namun tetap menerapkan langkah pencegahan Covid-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menerbitkan aturan baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat saat hendak bepergian keluar rumah. Dalam aturan ini, hal penting yang perlu diperhatikan sebelum keluar rumah adalah kondisi kesehatan, (*aladokter.com*)

Menurut Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda akan usai. Seluruh dunia (termasuk Indonesia) masih berupaya menemukan vaksin sehingga belum bisa dipastikan kapan pandemi akan berakhir. Sementara itu, berbagai sektor kehidupan mulai menunjukkan dampak pandemi, khususnya sektor ekonomi. Sehingga, dengan terpaksa masyarakat Indonesia diharuskan bisa beradaptasi dan hidup ‘berdampingan’ dengan virus ini, (*skata.info*).

Adaptasi kebiasaan baru adalah cara merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Keadaan dimana ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga masyarakat tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona. Adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan pada sektor atau bidang penting seperti rumah ibadah, pasar atau pertokoan, perkantoran, transportasi umum, hotel, dan restoran, serta dilakukan saat wilayah sudah menjadi zona aman (zona hijau) yang dihitung berdasarkan data dan fakta di lapangan. Adapun penjelasan dari pembagian zona tersebut, antara lain: (*skata.info*).

- a. Zona hijau: zona tidak terdampak
- b. Zona kuning: zona dengan tingkat resiko rendah

- c. Zona oranye: zona dengan tingkat resiko sedang
- d. Zona merah: zona dengan tingkat resiko tinggi

Ketika pelanggaran mulai berlaku, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak ideal, rajin mencuci tangan dengan sabun, olahraga teratur, dan jaga asupan gizi. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat bekerja, sejauh mana kegiatan daring (*online*) bisa didahulukan daripada luring (*offline*), (*skata.info*).

Berdasarkan Promkes 2020 dalam Azizah (2020: 05), ada beberapa aturan dari adaptasi kebiasaan baru yang harus dilaksanakan, antara lain:

- 1) Selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun

Dengan rajin mencuci tangan secara berkala dimanapun, diharapkan dapat mengurangi penularan virus covid 19 dengan menyentuh benda-benda umum atau bersalaman dengan orang lain.

- 2) Selalu menggunakan masker saat beraktivitas

Dengan menggunakan masker saat beraktivitas terutama ketika pergi keluar rumah, diharapkan dapat menghindarkan individu dari bahaya penularan virus covid 19 dari adanya interaksi atau komunikasi dengan orang lain serta lewat udara.

- 3) Menjaga jarak ketika keluar dari rumah

Dengan selalu menjaga jarak dengan orang lain ketika berada di luar rumah, ataupun tempat-tempat umum dapat menghindari individu dari bahaya penularan virus covid 19

- 4) Beristirahat yang cukup dan rajin berolahraga

Tidak hanya menjaga kesehatan dari luar, sebaiknya individu juga menjaga kesehatan dari dalam diri, seperti rutin berolahraga, berjemur dan istirahat yang cukup agar kondisi dan imun tubuh selalu terjaga di masa pandemi covid 19.

5) Makan makanan yang bergizi dan seimbang

Makan makanan seimbang adalah cara individu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi meningkatkan imun tubuh agar dapat terhindar dari bahaya virus covid 19. Dengan makan makanan seimbang dapat mengurangi kita dari penyakit atau tertular virus dan bakteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*). Agar lebih dapat memahami bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*), maka peneliti akan menjabarkan definisi tersebut dari para ahli.

Menurut Sugiyono (2013:21), penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara terperinci tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, hal ini dikarenakan untuk mendapatkan data-data yang lebih mendalam, metode deskriptif harus mengumpulkan data terlebih dahulu.

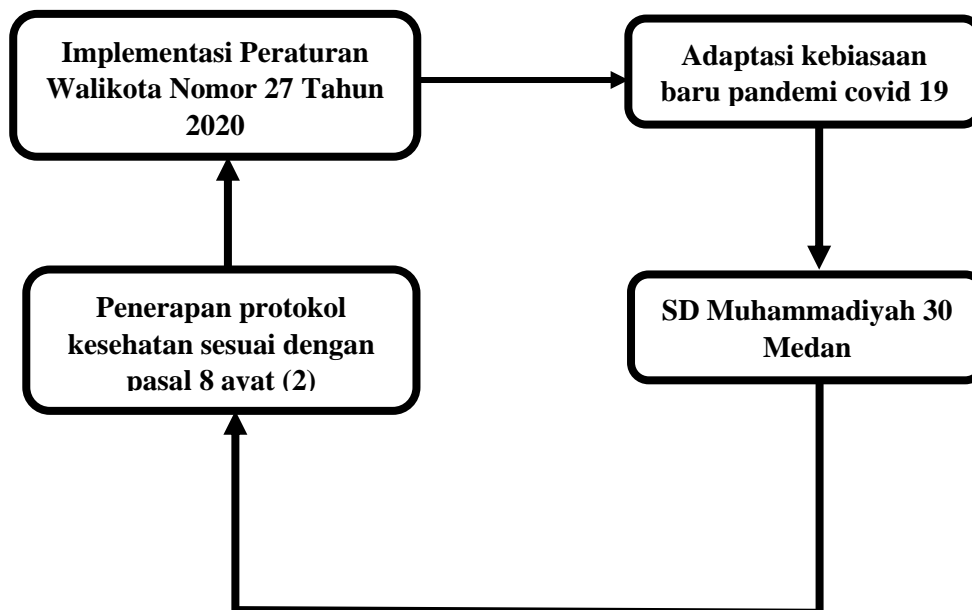
Penelitian deskriptif kualitatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang lama. Hal tersebut dimaksudkan bahwa penelitian deskriptif

kualitatif adalah penelitian *continuity descriptive research*, yang dilakukan secara terus menerus secara deskriptif terhadap suatu objek penelitian, (Sugiyono, 2013: 22).

Peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif dianggap dapat mendeskripsikan secara detail tentang implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di SD Muhammadiyah Medan. Selain itu, penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*) dapat menjawab semua pertanyaan secara lebih detail tentang pokok permasalahan yang sedang diteliti.

3.2 Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2010:60), seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka konsep atau kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka konsep merupakan penjelasan sementara terhadap kriteria utama agar suatu kerangka konsep bisa meyakinkan alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan atau hipotesis. Adapun kerangka konsep penelitian penulis adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan dalam kebijakan. Tindakan yang dilakukan tersebut untuk mengubah keputusan-keputusan yang menjadi pola operasional serta berusaha semaksimal mungkin dalam membuat perubahan besar atau kecil dalam sebuah kebijakan tersebut.
- b. Peraturan Walikota adalah sebuah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diatur oleh Walikota dan keberadaannya yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- c. Adaptasi kebiasaan baru covid 19 adalah cara merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Keadaan dimana ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga masyarakat tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona. Adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan pada sektor atau bidang penting seperti rumah ibadah, pasar atau pertokoan, perkantoran, transportasi umum, hotel, dan restoran, serta dilakukan saat wilayah sudah menjadi zona aman (zona hijau) yang dihitung berdasarkan data dan fakta di lapangan

3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Neundrof (dalam Ruane, 2013:119), kategorisasi merupakan tahap yang penting, karena dapat diketahui tingkat ketercukupan data untuk masing-masing kelompok. Pada penelitian kualitatif, ketercukupan diukur dengan ketuntasan dan kedalaman kajian. Kemudian, adapun kategorisasi penelitian penulis, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

Konsep Teoritis	Konsep Operasional
Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 berdasarkan teori implementasi David L. Weimer dan Aidan R. Vining	<ul style="list-style-type: none"> – Logika dari sebuah kebijakan – Lingkungan tempat kebijakan di operasikan – Kemampuan implementor
Adaptasi Penyesuaian baru di SD Muhammadiyah 30 Medan	<ul style="list-style-type: none"> – Mencuci tangan dengan menggunakan sabun – Menggunakan masker saat

	beraktivitas – Menjaga jarak dengan orang lain
--	---

Sumber: Bab II Uraian Teoritis

3.5 Narasumber Penelitian

Menurut Moleong (2015: 163), informan penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan peneliti untuk membantu memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian haruslah orang-orang yang benar-benar mengetahui secara detail tentang permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini bertujuan agar hasil jawaban penelitian menjadi akurat. Maka dari itu, yang menjadi informan penelitian dari penelitian ini, antara lain:

a. Kepala sekolah SD Muhamadiyah 30 Medan

Nama : Abdul Ripa'i,S.Pd

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan

Alamat : Jl. Garuda IV No. 76

b. Orang tua siswa SD Muhammadiyah 30 Medan

Nama : Prima Sri Rizky

Umur : 31 Tahun

Alamat : Jl. Murai XIII No. 120 Perumnas Mandala Medan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Satori dan Komariah (2011:103), pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data. Adapun teknik atau cara pengumpulan data menurut Satori & Komariah (2011: 103), antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang alami, bahkan kita sering melakukannya, baik secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apa pun, termasuk penelitian kualitatif dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

3. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yakni :

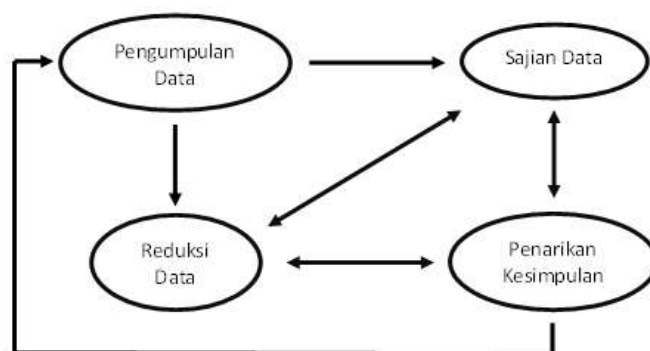
- a) *Offline*, yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian

- b) *Online*, yaitu menghimpun pengambilan data melalui internet.
- c) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian dapat berupa data-data dari tempat penelitian, foto dan video objek penelitian dan sejenisnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Nurdin dan Hartati (2019:203), analisis data adalah sesuatu proses atau upaya pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya telah jenuh. Model interaktif Miles Huberman dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar model interaktif Miles dan Huberman

1. Pengumpulan data : pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi bahkan catatan lapangan yang telah didapatkan saat melakukan penelitian.
2. Kondensasi data : kondensasi data diperoleh dari data yang sudah terkumpul di lapangan. Di dalam kondensasi data terjadi proses seleksi, menyederhanakan mengabstraksi dan mentransformasikan data tertulis atau yang telah didapatkan di lapangan.
3. Penyajian data : tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis sehingga ringkasan data yang diperoleh selanjutnya dibuat dalam suatu bentuk transkrip, gambar, skema dan lain sebagainya untuk mempermudah penelitian dalam menggambarkan atau mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.
4. Kesimpulan : merupakan akhir dari kegiatan analisis data kualitatif, yakni dengan penarikan kesimpulan dari topik pembahasan yang dibuat. Jika data yang terkumpul sudah cukup memadai dan belum didukung dengan bukti yang kuat makanya dapat ditarik kesimpulan sementara, dan jika data dirasa sudah lengkap dan jelas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 30 Medan yang beralokasi di jalan Jl. Nuri XIII No.500 A, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20224. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan berkisar pada bulan September-Oktober 2021 pada waktu yang telah ditentukan.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat SD Muhammadiyah 30 Medan

SD Muhammadiyah 30 Medan berdiri pada tahun 1987 M. Sekolah ini berada di Jalan Nuri XIII No. 500 A Perumnas Mandala. Jumlah murid disekolah ini adalah 180 orang. Untuk luas wilayah SD Muhammadiyah 30 Medan lebih kurang 650 m². SD Muhammadiyah 30 Medan terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai. Yang berkembang sebagai daerah Jasa Pendidikan diantara pemukiman warga.

2. VISI DAN MISI SD MUHAMMADIYAH 30 MEDAN

Visi : Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi iptek dan berwawasan global.

Indikator Visi :

- Terciptanya generasi yang sholeh/sholeha, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- Berkembangnya daya kreatifitas semua warga sekolah secara optimal
- Tumbuhnya jiwa kemandirian dan semangat juang yang tinggi dalam rangka bersaing di era globalisasi.
- Terciptanya generasi yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik.
- Terbentuknya jiwa yang berakhlak mulia dan peduli dengan sesama.

Misi :

- Melaksanakan pembelajaran sesuai Al-Quran dan Al Hadist

- Membiasakan siswa berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan bekerja sama.
- Melibatkan peran serta peserta didik, guru, orang tua dan masyarakat.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) SEKOLAH

a. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah sebagai Pendidik (Educator)

- a) Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program pengajaran dan remedial.
- b) Membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari.
- c) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS dan mengikuti lomba diluar sekolah.
- d) Mengembangkan staf melalui pendidikan/latihan, melalui pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon Kepala Sekolah.
- e) Mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan/latihan, pertemuan, seminar, diskusi dan bahan-bahan.

Kepala Sekolah sebagai Manajer (Manager)

- a) Mengelola administrasi kegiatan belajar dan bimbingan konseling dengan memiliki data lengkap administrasi kegiatan

belajar mengajar dan kelengkapan administrasi bimbingan konseling.

- b) Mengelola administrasi kesiswaan dengan memiliki data administrasi kesiswaan dan kegiatan ekstra kurikuler secara lengkap.
- c) Mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data administrasi tenaga guru dan Tata Usaha.
- d) Mengelola administrasi keuangan Rutin, BOS, dan Komite.
- e) Mengelola administrasi sarana/prasarana baik administrasi gedung/ruang, mebelair, alat laboratorium, perpustakaan.

Kepala Sekolah sebagai Pengelola Administrasi (Administrator)

- a) Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- b) Menyusun organisasi ketenagaan disekolah baik Wakasek, Pembantu Kepala Sekolah, Walikelas, Kasubag Tata Usaha, Bendahara, dan Personalia Pendukung misalnya pembina perpustakaan, pramuka, OSIS, Olah raga. Personalia kegiatan temporer, seperti Panitia Ujian, panitia peringatan hari besar nasional atau keagamaan dan sebagainya.
- c) Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.

- d) Mengoptimalkan sumberdaya manusia secara optimal, memanfaatkan sarana / prasarana secara optimal dan merawat sarana prasarana milik sekolah.

Kepala Sekolah sebagai Penyelia (Supervisor)

- a) Menyusun program supervisi kelas, pengawasan dan evaluasi pembelajaran.
- b) Melaksanakan program supervisi.
- c) Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru/karyawan dan untuk pengembangan sekolah.

Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (Leader)

- a) Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggungjawab, berani mengambil resiko dan berjiwa besar.
- b) Memahami kondisi guru, karyawan dan anak didik.
- c) Memiliki visi dan memahami misi sekolah yang diemban.
- d) Mampu mengambil keputusan baik urusan intern maupun ekstern.
- e) Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis.

Kepala Sekolah sebagai Pembaharu (Inovator)

- a) Mampu mencari, menemukan dan mengadopsi gagasan baru dari pihak lain.
- b) Mampu melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling, pengadaan dan pembinaan

tenaga guru dan karyawan, kegiatan ekstra kurikuler dan mampu melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya manusia di Komite dan masyarakat.

Kepala Sekolah sebagai Pendorong (Motivator)

- a) Mampu mengatur lingkungan kerja.
- b) Mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai.
- c) Mampu menerapkan prinsip memberi penghargaan maupun sanksi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Wakil Kepala Sekolah

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan
- Pengorganisasian
- Pengarahan
- Ketenagaan
- Pengkoordinasian
- Pengawasan
- Penilaian
- Identifikasi dan pengumpulan data
- Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan
- Membuat laporan secara berkala

c. Urusan Kurikulum

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- a) Menyusun program pengajaran
 - b) Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
 - c) Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
 - d) Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir
 - e) Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan
 - f) Mengatur jadwal penerimaan rapor dan STTB
 - g) Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar.
 - h) Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan
 - i) Mengatur pengembangan MGMP/MGBP dan koordinator mata pelajaran
 - j) Melakukan supervisi administrasi akademis
 - k) Melakukan pengarsipan program kurikulum
 - l) Penyusunan laporan secara berkala
- d. Urusan Kesiswaan

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- a) Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi: Kepramukaan, PMR, UKS, Paskibraka, pesantren kilat
- b) Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan kesiswaan/OSIS dalam rangka
- c) Menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus OSIS

- d) Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi
 - e) Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental
 - f) Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima bea siswa
 - g) Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
 - h) Mengatur mutasi siswa
 - i) Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah
 - j) Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi
 - k) Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala
- e. Sarana Prasarana

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- a) Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana
 - b) Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana
 - c) Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran
 - d) Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana
 - e) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan
 - f) Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana secara rutin
 - g) Menyusun laporan secara berkala
- f. Humas

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah
- b. Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid
- c. Membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya
- d. Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah
- e. Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah
- f. Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah
- g. Menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan pameran hasil pendidikan (gebyar pendidikan)
- h. Mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat masalah-masalah yang bersifat umum
- i. Menyusun laporan secara berkala

h. Tata Usaha

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam kegiatan:

- a. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah
- b. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar
- c. Pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah
- d. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah
- e. penyusunan administrasi sekolah meliputi kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan

- f. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah secara keseluruhan
- g. Penyusunan tugas staf Tata Usaha dan tenaga teknis lainnya
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala
- i. Wali Kelas

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

- Pengelolaan Kelas:
 - a. Tugas Pokok meliputi:

Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan

Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik

Membina karakter, budi pekerti dan kepribadian anak didik

- b. Keadaan Anak Didik

Mengetahui jumlah (Putra dan Putri) dan nama-nama anak didik

Mengetahui identitas lain dari anak didik

Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari

Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik

- c. Melakukan Penilaian

Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah

Kerajinan, Kelakuan, dan Kedisiplinan anak

- d. Mengambil Tindakan Bila Dianggap Perlu

Pemberitahuan , pembinaan, dan pengarahan

Peringatan secara lisan dan tertulis

Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah

e. Langkah Tindak Lanjut

Memperhatikan buku nilai rapor anak didik

Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik

Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan

- Penyelenggaraan Administrasi Kelas, meliputi:

a. Denah tempat duduk anak didik

b. Papan absensi anak didik

c. Daftar Pelajaran dan Daftar Piket

d. Buku Presensi

e. Buku Jurnal kelas

f. Tata tertib kelas

a) Penyusunan dan pembuatan statistik bulanan anak didik

b) Pembuatan catatan khusus tentang anak didik

c) Pencatatan mutasi anak didik

d) Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar

G U R U

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan

KBM, meliputi:

1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian.

4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
6. Mengisi daftar nilai anak didik
7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran
8. Membuat alat pelajaran/alat peraga
9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran
13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik
14. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran
15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat

KODE ETIK PENDIDIK

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan negara
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik
4. Berbakti kepada peserta didik dalam membantu mereka mengembangkan diri
5. Bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni sebagai wahana dalam pengembangan peserta didik

6. Lebih mengutamakan tugas pokok dan atau tugas negara lainnya dari pada tugas sampingan
7. Bertanggung jawab, jujur, berprestasi, dan akuntabel dalam bekerja
8. Dalam bekerja berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan
9. Menjadi teladan dalam berperilaku
10. Berprakarsa
11. Memiliki sifat kepemimpinan
12. Menciptakan suasana belajar atau studi yang kondusif
13. Memelihara keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta bekerja sama dengan baik dalam pendidikan
14. Mengadakan kerja sama dengan orang tua siswa dan tokoh- tokoh masyarakat
15. Taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan
16. Mengembangkan profesi secara kontinu
17. Secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi

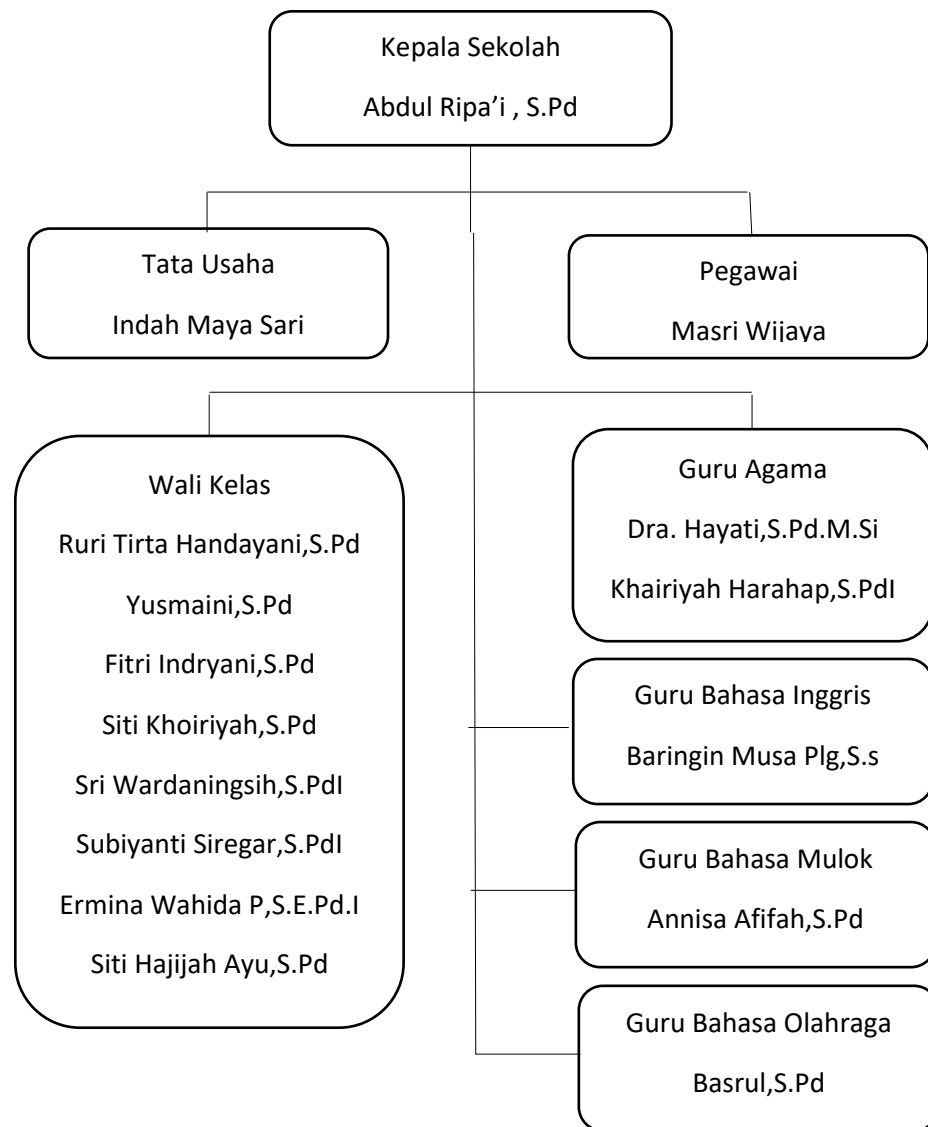
TATA TERTIB GURU DAN KARYAWAN

1. Hari Dinas selama 6 hari kerja
2. Mempersiapkan sarana dan kelengkapan proses pembelajaran
3. Mengisi daftar hadir saat datang dan pulang
4. Mengisi jurnal kegiatan pembelajaran sehari-hari

5. Mengumpulkan jurnal kegiatan pada akhir semester
6. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah disepakati
7. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya
8. Memahami dan mengamalkan Wawasan Wiyata Mandala
9. Apabila berhalangan hadir dalam dinas, harus:
Ada pemberitahuan (surat / kurir / telepon / SMS)
Substansi izin harus jelas dan sesuai ketentuan kedinasan
Ada surat dokter (apabila sakit lebih dari 3 hari)
Memberikan/mengirimkan tugas untuk siswa melalui guru piket
10. Memakai seragam dengan atribut lengkap:
Hari Senin memakai PSH abu-abu (Guru) dan PDH Hansip (Karyawan)
Hari Selasa – Rabu memakai PSH warna bebas (Guru) dan PDH Coklat (Karyawan)
Hari Kamis memakai batik
Hari Jum'at – Sabtu memakai pakaian bebas rapi
Setiap tanggal 17 Agustus memakai pakaian KORPRI
11. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin/hari besar nasional
12. Melaksanakan tugas menjadi pembina upacara sesuai dengan jadwal

Struktur Organisasi SD Muhammadiyah 30 Medan

Gambar 3.9



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pengumpulan data yang diambil peneliti adalah melakukan wawancara dengan proses tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan satu responden. Untuk proses wawancara tersebut peneliti membuat beberapa pertanyaan untuk masing-masing narasumber yang diangkat dari indikato penelitian. Selain wawancara peneliti juga menggunakan metode observasi dan metode dokumentasi dalam melakukan penelitian guna membantu peneliti untuk mendapatkan data yang efektif dalam penelitian.

Peneliti menetapkan 2 (dua) narasumber yang terdiri dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan dan kepada Orang Tua Murid SD Muhammadiyah 30 Medan.

1. Informan pertama Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan

Nama : Abdul Ripa'i,S.Pd

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Profersi : Kepala Sekolah

Informan yang pertama ini merupakan Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah 30 Medan, penelita melakukan wawancara pada hari Rabu, 29 Semptember 2021 jam 10.00 WIB di SD Muhammadiyah 30 Medan. Peneliti bertanya kepada informan, menurut bapak bagaimana Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru bagi SD

Muhammadiyah 30 Medan?. Informan menjawab “menurut saya peraturan walikota ini sudah sesuai dengan kebiasaan baru yang diterapkan di SD Muhammadiyah 30 Medan”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut bapak apa saja aturan-aturan di SD Muhammadiyah 30 Medan ini?. Informan menjawab “adanya program mencuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih, pengecekan suhu yang rutin, dan selalu menggunakan masker”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut bapak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, apa saja hambatan yang ditemui?. Informan menjawab “untuk saat ini hambatan yang kami temui adalah tidak terjangkaunya jaringan internet, termasuk kuota internet murid yang minimalis. Terus pembelajaran dominan belum interaktif, pembelajarannya cenderung tugas online dan tugas yang diberikan kepada murid menumpuk dan dalam hal ini murid maupun wali murid tidak semua mempunyai handphone ataupun smartphone”

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut bapak bagaimana orang-orang yang berada di lingkungan sekolah dalam rangka menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait adaptasi kebiasaan baru?. Informan menjawab “orang-orang yang berada di lingkungan sekolah sudah mulai tertib melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk kebaikan bersama”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut bapak apa saja hal yang dirubah atau ditambah dimasa adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19?.

Informan menjawab “untuk hal yang ditambah yaitu seperti selalu menggunakan masker, berjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan yang sudah disediakan. Untuk hal yang dirubah adalah melakukan pembelajaran secara daring dan tidak adanya pembelajaran tatap muka selama pandemi”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut bapak dalam rangka melengkapi atau merubah lingkungan dalam sekolah apasaja hambatan yang ditemukan?. Informan menjawab “Hambatan yang saya temui selama masa covid ini, Susahnya mengatasi masyarakat lingkungan untuk tetap melakukan protokol kesehatan’.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut bapak bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam memberikan arahan kepada siswa untuk menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru covid-19 ?. Informan menjawab “Yang dilakukan guru dalam memberikan arahan yaitu seperti Selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, dan mencuci tangan untuk menghindari virus covid-19”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut bapak bagaimana tanggapan para guru terkait dengan penetapan yang di berlakukan sekolah terkait dengan adaptasi baru pandemi covid-19 di SD Muhammadiyah 30 Medan?. Informan menjawab “Tanggapan para guru di SD Muhammadiyah 30 Medan terkait adaptasi baru covid-19 yaitu tetap menjalani tugas-tugasnya seperti biasa meski dalam masa pandemi yang saat ini telah dihadapi. sedikit kesulitan

untuk menghadapi siswa yang tidak semua memiliki smartphone sebagai media daring.

Kemudian peneliti bertanya kembali “menurut bapak apa saja hambatan yang ditemukan baik dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengatur siswa dalam menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi baru pandemi covid-19?. Informan menjawab “Adapun hambatan yang di hadapi dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu banyaknya yang masih melanggar aturan yang telah di tetapkan seperti masih tidak menggunakan masker.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana kelengkapan fasilitas untuk mencuci tangan di SD muhammadiyah 30?. Informan menjawab “Fasilitas untuk mencuci tangan di SD Muhammadiyah 30 Medan sudah terpenuhi dengan ketentuan pemerintah untuk tiap sekolah harus menyediakan tempat mencuci tangan untuk siswa maupun para guru di lingkungan sekolah.

Kemudian peneliti bertanya kembali, selain tempat mencuci tangan, apa saja alternatif lain yang disediakan sekolah agar tangan dapat tetap bersih dan steril?. Informan menjawab “Adanya handsanitizer untuk membersihkan tangan yang di sediakan pihak sekolah”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja hambatan ketika mensosialisasi seluruh orang disekolah untuk rutin mencuci tangan? Informan menjawab “Sejauh ini hambatan untuk menyuruh para siswa yang hadir dan berkunjung ke sekolah tidak sulit untuk mengarahkannya.”

Kemudian peneliti bertanya kembali, Bagaimana efektifitas penggunaan masker di SD Muhammadiyah 30 medan? Informan menjawab “Penggunaan masker di Sd Muhammadiyah 30 Medan sudah mematuhi peraturan yang telah di tetapkan, meskipun kadang masih ada beberapa siswa yang masih sering melepaskan masker.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana upaya yang dilakukan sekolah untuk guru, siswa, atau staff lainnya yang tidak atau lupa menggunakan masker. Informan menjawab “di SD Muhammadiyah 30 Medan menyediakan 1 box masker yang di peruntukkan untuk siswa, guru,staff yang lupa membawa masker.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja hambatan yang di temui saat mensosialisasikan atau menyediakan masker?. Informan menjawab “Hambatannya meski SD muhammadiyah 30 menyediakan masker, tapi ada peringatan untuk siswa dan guru yang sering kali lupa membawa masker, tapi sejauh ini siswa dan guru masih selalu mengikuti protokol kesehatan.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk melakukan jaga jarak di sekolah? Informan menjawab “Untuk saat ini, karena sekolah masih pembelajaran daring maka pemberlakuan jaga jarak di terapkan saat siswa menghadiri suatu kegiatan kesekolah, misal mengambil tugas dan mengumpulkan tugas, kerap kiranya kami selalu mengingatkan untuk menjaga jarak.

Kemudian peneliti bertanya kembali, Bagaimana reaksi siswa dan orang orang yang ada di sekolah dengan pemberlakuan jaga jarak tersebut?.

Informan menjawab “Reaksi siswa dan orang-orang yang ada di sekolah menerima dengan baik karena sudah rutin diingatkan untuk kebaikan bersama.”

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut bapak apa saja hambatan yang ditemui untuk menyuruh seluruh orang yang berada di lingkungan sekolah saling menjaga jarak?. Informan menjawab, “Sulitnya menyuruh siswa untuk menjaga jarak, karena bedanya pemikiran orang dewasa dan anak-anak”.

2. Informan kedua orang tua murid SD Muhammadiyah 30 Medan

Nama : Prima Sri Rizki

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Orang Tua Murid

Informan yang kedua ini merupakan Wali Murid di SD Muhammadiyah 30 Medan, peneliti melakukan wawancara pada hari Kamis, 30 September 2021 jam 14.00 WIB di SD Muhammadiyah 30 Medan. Peneliti bertanya kepada informan, menurut Ibu bagaimana Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru bagi SD Muhammadiyah 30 Medan?. Informan menjawab “Saya sebagai masyarakat awam sangat kurang mengerti dengan peraturan walikota Nomor 27 Tahun 2020, tapi setelah dijelaskan oleh kamu, menurut saya segala aturan baru yang dibuat walikota tentang aturan covid-19 sudah cukup dipahami oleh kalangan masyarakat seperti saya, terutama sebagai wali murid yang harus memantau selalu kegiatan anak saya pada saat sekolah.

Kemudian peneliti bertanya kembali, Menurut Ibu apakah seluruh orang yang berada di lingkungan dapat menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif?. Informan menjawab, “Mau tidak mau, kami selaku orang tua murid menerima dan melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah demi kebaikan bersama.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut ibu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, apa saja hambatan yang ditemui?. Informan menjawab “untuk saat ini hambatan yang kami temui adalah tidak terjangkaunya jaringan internet, termasuk kuota internet murid yang minimalis. Terus pembelajaran dominan belum interaktif, pembelajarannya cenderung tugas online dan tugas yang diberikan kepada murid menumpuk dan dalam hal ini murid maupun wali murid tidak semua mempunyai handphone ataupun smartphone”

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut Ibu bagaimana orang orang yang berada di lingkungan sekolah dalam rangka menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait adaptasi kebiasaan baru?. Informan menjawab “orang-orang yang berada di lingkungan sekolah cukup tertib dalam menerima segala aturan yang telah di buat oleh pihak sekolah”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut Ibu apa saja hal yang dirubah atau ditambah dimasa adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19?. Informan menjawab “Adapun hal yang ditambahseperti selalu menggunakan masker pada saat berada di lingkungan sekolah, berjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapi dan yang sudah disediakan. Untuk hal

yang dirubah adalah melakukan pembelajaran secara daring dan tidak adanya pembelajaran tatap muka selama pandemi”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut Ibu dalam rangka melengkapi atau merubah lingkungan dalam sekolah apasaja hambatan yang ditemukan?. Informan menjawab “Hambatan yang saya temui selama masa covid ini, Susahnya mengatasi masyarakat lingkungan untuk tetap melakukan protokol kesehatan’.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut ibu bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam memberikan arahan kepada siswa untuk menerapkan protokol kesehatan dimasa adaptasi baru covid-19 ?. Informan menjawab “Yang dilakukan guru dalam memberikan arahan yaitu seperti selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak antara siswa dengan siswa lain”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut Ibu bagaimana tanggapan Anda sebagai orang Tua di berlakukan sekolah terkait dengan adaptasi baru pandemi covid-19 di SD Muhammadiyah 30 Medan?. Informan menjawab “Tanggapan para orang tua di SD Muhammadiyah 30 Medan terkait adaptasi baru covid-19 yaitu tetap menjalani tugas-tugasnya seperti biasa meski dalam masa pandemi yang saat ini telah dihadapi. sedikit kesulitan untuk menghadapi anak yang kurang memahami pembelajaran karena dilakukan secara daring.

Kemudian peneliti bertanya kembali “menurut Ibu apa saja hambatan yang ditemukan baik dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengatur siswa dalam menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi baru pandemi covid-

19?. Informan menjawab “Adapun hambatan yang di hadapi dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu merubah kebiasaan anak yang belum terbiasa dengan menggunakan masker, harus lebih di biasakan untuk mengikuti aturan yang di tetapkan.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana kelengkapan fasilitas untuk mencuci tangan di SD muhammadiyah 30?. Informan menjawab “Fasilitas untuk mencuci tangan di SD Muhammadiyah 30 Medan sudah terpenuhi dengan ketentuan pemerintah untuk tiap sekolah harus menyediakan tempat mencuci tangan untuk siswa maupun para guru di lingkungan sekolah.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut Ibu selain tempat mencuci tangan, apa saja alternatif lain yang disediakan sekolah agar tangan dapat tetap bersih dan steril?. Informan menjawab “Adanya handsanitizer untuk membersihkan tangan yang di sediakan pihak sekolah untuk alternatif lain untuk membersihkan tangan”.

Kemudian peneliti bertanya kembali, Menurut Ibu apa saja hambatan ketika mensosialisasi seluruh orang disekolah untuk rutin mencuci tangan? Informan menjawab “Sejauh ini hambatan untuk menyuruh Anak yang hadir dan berkunjung ke sekolah tidak sulit untuk mengarahkannya.”

Kemudian peneliti bertanya kembali, Menurut Ibu Bagaimana efektifitas penggunaan masker di SD Muhammadiyah 30 medan? Informan menjawab “Penggunaan masker di Sd Muhammadiyah 30 Medan sudah mematuhi peraturan yang telah di tetapkan, meskipun kadang masih ada beberapa siswa

yang masih sering melepaskan masker, karena mengarahkan anak-anak harus sabar.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana upaya yang dilakukan sekolah untuk guru, siswa, atau staff lainnya yang tidak atau lupa menggunakan masker. Informan menjawab “di SD Muhammadiyah 30 Medan menyediakan 1 box masker yang di peruntukkan untuk siswa, guru,staff yang lupa membawa masker.

Kemudian peneliti bertanya kembali, Menurut Ibu apa saja hambatan yang di temui saat mensosialisasikan atau menyediakan masker?. Informan menjawab “Hambatannya meski SD muhammadiyah 30 menyediakan masker, tapi ada peringatan untuk siswa dan guru yang sering kali lupa membawa masker, tapi sejauh ini siswa dan guru masih selalu mengikuti protokol kesehatan.

Kemudian peneliti bertanya kembali, Menurut Ibu apa saja upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk melakukan jaga jarak di sekolah? Informan menjawab “Sejauh ini, karena sekolah masih pembelajaran daring maka pemberlakuan jaga jarak di terapkan saat siswa menghadiri suatu kegiatan kesekolah, misal mengambil tugas dan mengumpulkan tugas, dan kami sebagai orang tua tetap mengingatkan anak untuk selalu mengikuti protokol kesehatan.

Kemudian peneliti bertanya kembali, Menurut ibu Bagaimana reaksi siswa dan orang orang yang ada di sekolah dengan pemberlakuan jaga jarak tersebut?. Informan menjawab “Reaksi siswa dan orang orang yang ada

disekolah menerima dengan baik karena sudah rutin di peringati untuk kebaikan bersama dan sudah mulai terbiasa karena di lakukan setiap saat.

Kemudian peneliti bertanya kembali, menurut Ibu apa saja hambatan yang di temui untuk menyuruh seluruh orang yang berada di lingkungan sekolah saling menjaga jarak?. Informan menjawab, Sulitnya menyuruh siswa untuk menjaga jarak , karena bedanya pemikiran orang dewasa dan anak-anak, sulitnya untuk memberi tahu anak-anak.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan. Untuk kebijakan tersebut diatur dan ditetapkan, agar seluruh murid, guru ataupun masyarakat dapat terhindar dari penularan virus covid 19. Aturan-aturan yang ditetapkan telah disesuaikan dengan rutinitas masyarakat, seperti tetap menggunakan masker ketika berada dilingkungan sekolah dan mencuci tangan dengan sabun ketika ingin memasuki sekolah. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat yang datang ke sekolah tetap dalam keadaan aman dan terhindar dari virus covid 19.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2015:12), yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan dalam kebijakan. Tindakan yang dilakukan tersebut untuk mengubah keputusan-keputusan yang menjadi pola operasional serta berusaha semaksimal mungkin dalam membuat perubahan besar atau kecil dalam sebuahkebijakan tersebut.

Mulyadi (2015:12) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan sebuah implementasi dapat berjalan dengan efektif apabila melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Adanya pelaksanaan keputusan oleh instansi atau lembaga pelaksana. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, benar adanya bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19 dijalankan oleh sebuah sekolah, yakni SD Muhammadiyah 30 Medan. Adapun tugas dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan adalah melihat apakah sekolah sudah menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dilaksanakan dengan baik.

2. Kesiapan sebuah kelompok dalam melaksanakan sebuah keputusan Kebijakan. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa Satpol PP adalah sebuah instansi yang bersedia menjalankan tugas sebagai Satgas covid 19 untuk menghimbau, mensosialisasikan, menertibkan dan mengawasi seluruh tempat-tempat umum seperti rumah ibadah tempat adanya interaksi masyarakat dalam jumlah yang banyak.

3. Dampak nyata dari sebuah keputusan baik itu dikehendaki ataupun tidak Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa dampak nyata yang telah dilakukan Satpol PP Kota Medan sebagai Satgas covid 19 adalah memberikan sanksi atau pencabutan sementara izin usaha ketika masyarakat tidak mengindahkan

protokol kesehatan yang telah ditetapkan dimasa adaptasi baru pandemi covid19.

4. Penyiapan sumber daya, unit dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa petugas Satpol PP di didik untuk memahami semua Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020. Hal ini bertujuan agar ketika melakukan pekerjaan sebagai Satgas covid 19, seluruh petugas sudah memahami kebijakan tersebut dan dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif. Model pekerjaan juga dilakukan lebih ketat, seperti dilaksanakan pada pagi dan malam hari rutin setiap hari tanpa hari libur, dan apabila ada petugas yang lalai dalam menjalankan tugas, dapat dikenakan sanksi ringan sebagai hukuman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan teori implementasi yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan oleh implementor yakni Satpol PP Kota Medan sebagai Satgas covid 19. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Satpol PP dalam menghimbau, mensosialisasikan,mentertibkan dan mengawasi seluruh tempat-tempat umum seperti rumah ibadah tempat adanya interaksi masyarakat dalam jumlah yang banyak. Satpol PP telah berupaya semaksimal mungkin untuk memantau seluruh tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah ibadah, pusat pasar, pasar tradisional, pasar modern, tempat berkumpul masyarakat dan lain sejenisnya secara berkala setiao hari pada pagi dan malam hari. Begitu pula pada hari libur dan tanggal merah. Hal ini dilakukan

agar seluruh masyarakat dapat menaati dan mengindahkan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan dapat terhindar dari bahaya penularan virus covid 19.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian maka ditemukan kesimpulan yaitu Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pandemi covid 19 telah terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan himbauan yang dilakukan pihak SD Muhammadiyah 30 Medan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan telah terimplementasi dengan baik.

Bentuk partisipasi yang dilakukan Guru, Wali Murid, Sebagai pelaksana implementor adalah melaksanakan, menghimbau serta menyediakan fasilitas-fasilitas kebutuhan penerapan protokol kesehatan untuk seluruh siswa. Sedangkan bagi masyarakat bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan dan disediakan oleh pelaksana (implementor) dengan cara selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir serta menjaga jarak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti diatas, saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Bagi Kepala Sekolah dan Staff guru SD Muhammadiyah 30 Medan, diharapkan sudi kiranya dapat melakukan pengawasan lebih intensif kepada seluruh siswa yang ada di SD Muhammadiyah 30 Medan secara

berkala, agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan efektif dan SD Muhammadiyah 30 Medan bebas dari bahaya penularan virus covid 19.

2. Bagi Orang Tua , diharapkan sudi kiranya melakukan pengontrolan bagi Anak-anak nya untuk tetap mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang telah di buat oleh pihak sekolah, agar anjuran pemerintah dapat berjalan dengan baik sehingga kondisi pembelajaran bisa kembali normal seperti sedia kala.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan sudi kiranya melaksanakan seluruh protokol kesehatan adaptasi baru pandemi covid 19 dengan lebih efektif lagi, agar tidak tertular virus covid 19 serta selalu menjaga jarak, tidak pergi ke tempat kerumunan dan selalu menyediakan dan memakai masker, *handsanitizer* secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agostiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Teori*, Jakarta : Rajawali Press.
- Anderson, James. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS.
- Azizah, Nur. 2020. *Sruktur dan Kultur Budaya Dalam Keluarga di Era AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) di Lingkungan Keluarga Kota Bandung*.
- Dunn, William, N. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Kapioru. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis Dan Partisipasi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Moleng, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salim, Syahrums. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sore, Uddin, B & Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasinya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujianto, Agus Eko. 2008. *Teori Dan Praktik Manajemen*, Yogyakarta : Andi Offset.

Winarno, Budi. 2010. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahidah, Idah. 2020. *Pandemik Covid 19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan*. Jurnal Manajemen dan Organisasi: Vol. 11 No. 03. P-ISSN: 2088-9723

Jurnal :

Journal of Gender and Family Studies: Az-Zahra. Vol. 01 No. 01. ISSN
(online): 2746-8593.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Ruang Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 30 Medan





UIN
UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jember dan sekitarnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Bazarri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan,20....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Chairunnisa
N P M : 1603160020
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2008 Dalam Rangka Pelaksanaan Adaptasi kebiasaan baru di 40 Muhammadiyah 30 Medan.	<i>Nil</i>
2	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2008 pasal 8 Terhadap Efektifitas Pembelajaran Media During pack Anti Covid	
3	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Adaptasi kebiasaan baru untuk penyelenggaraan event wedding bagi Masyarakat kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl.20....

Chairunnisa
(.....Chairunnisa.....)

Ketua

(.....*Nil*.....)

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa Menjadi acuan di era digitalisasi
sistem dan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Maktar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631083

<https://fisip.umsu.ac.id> * fisip@umsu.ac.id [i](#) [umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 772/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 06 Juli 2021 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **CHAIRUNNISA**
N P M : 1603100020
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DI SD MUHAMMADIYAH 30 MEDAN**
Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 077.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Juli 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 25 Dzulqaidah 1442 H
06 Juli 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan:

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pustinggal.

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 390/UND/II.3-A/UNISU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Online/Daring
Pembicara : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SIK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBERING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	DELFA RISKA BR MAMUPLUNG	1703100041	SYAFRUDIN, S.Sos. MH	Dr. ABERIN SALEH, S.Sos. MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PENCADILAN NEGERI BINJAI
2	EKA PRATIWI HARGINI BR LUBIS	1703100067	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	DEDI AMRZAL, S.Sos. M.Si	EFEKTIVITAS PENGURUSAN IZIN ANGKUTAN KOTA DALAM TRANSKENDAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
3	MUHAMMAD ARIFF LUBIS	1603100090	Dr. ABERIN SALEH, S.Sos. MSP.	DEDI AMRZAL, S.Sos. M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENYATAAN PASAR RAHYAT SEI RAMPAN SENDANG BEDAGAN
4	CHAI RUMENISA	1603100020	DEDI AMRZAL, S.Sos. M.Si	SYAFRUDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WILKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBERSAMAAN BARU DI SD MUHAMMADIYAH 30 MEDAN
5	REY EMIR HAN	1703100057	SYAFRUDIN, S.Sos. MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WILKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI BARU TEMPAT HIBURAN DI KOTA MEDAN

Medan, 07 Agustus 2021

16 Agustus 2021 M

Dr. Achmad Syarif, S.Sos., M.S.P.



UIN
Bina Masyarakat
Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Chairunnisa
 NPM : 1603100020
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Di SD Muhammadiyah 30 Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	4.6.21	- Perbaiki masalah Penulisan pd latar belakang. dan Bab. I.	
2.	15.6.21	- Perbaiki kata-kata rancu yang ada pada uraian teoritis pada Bab. II	
3.	5.7.21	- Jelaskan jumlah nara sumber dan lengkapi datanya Bab. III	
4.	21.9.21	Acc Bab. I, II dan III	
5.	2.1.22	- Pada Bab. IV dan Bab. V dibuat Halaman - sub Bab Pembahasannya - harus dibuat	
6.	10.1.22	- judul Bab. V diganti menjadi Penutup - Perbaiki Penulisan daftar Pustaka	
7.	10.2.22	- Lengkapi semua surat "ull kelengkapan skripsi. (Surat Pengantar, daftar isi dll)	
8.	24.3.22	Acc Pemb. skripsi siap ull di urahkan dan sedang pispk ke guru	



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN DAN GUGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 530/UND/2022/UMSU/03/7/2022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



Sl. 10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	REGINA NADYA MIRANTHY	1803100007	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	Dr. ARIFIN SALEH, M.SP	EFEKTIVITAS PROSES CAUSALISME PIMPINAN DALAM MENGELOLA PDAM TRITA RIUALO KARYA KOTA TAJUJANG BALU
7	MAYANG NANTA RIANDA	1703100012	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	AFFAN AL-QUODUS, S.Sos., M.SI	STRATEGI PERENCANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI KOTA MEDAN
8	CHAIRUNNISA	1803100020	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	RAFIQOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI SO MUKHAMMADYAH 30 MEDAN
9	HADDAD ALWI LUBIS	1803100013	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	RAFIQOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO. 11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN
10	NURMADAH AZZAHRA	1803100008	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	RAFIQOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARGAAN DI DESA SIDOMULYO KEC. BULUH HILIR KAB. LABUHAN BATU

Menulis Skripsi :

1.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sevrians

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.IKom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chairunnisa
Alamat : Jl. Murai 14 No. 90
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 23 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua
- Ayah : Subnur
- Ibu : Juliana
Alamat : Jl. Murai 14 No. 90

Pendidikan

- | | |
|--|-----------|
| 1. SD Muhammadiyah 30 Medan | 2003-2009 |
| 2. SMP Negeri 12 Medan | 2009-2012 |
| 3. SMK Harapan Mandiri Medan | 2012-2015 |
| 4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2016-2022 |

Medan, Mei 2022

Peneliti,

Chairunnisa